

ABSTRAK

Judul Tesis : **Analisis Yuridis Keterkaitan Antara Dana Talangan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dengan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Oleh Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung)**

Nama Mahasiswa : **Sandra Debby Irawan**

NIM : **207161020**

Kata Kunci : ***Jalan Tol, Proyek Strategis Nasional, Dana Talangan***

Jalan Tol Trans Sumatera merupakan Proyek Strategis Nasional dimana berdasarkan Perpres Nomor 100 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 117 Tahun 2015 Pemerintah menugaskan PT Utama Karya (Persero) untuk melaksanakan pengusahaannya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memberikan dana talangan pengadaan tanah pada Proyek Strategis Nasional. Terdapat keterkaitan antara dana talangan pengadaan tanah tersebut dengan pelaksanaan pembangunan jalan tol oleh BUMN. Salah satunya pada proyek jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung yang termasuk Jalan Trans Sumatera dan merupakan Proyek Strategis Nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana keterkaitan antara penyediaan dana talangan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol untuk kepentingan umum dengan pelaksanaan pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung oleh Badan Usaha Milik Negara dan apakah pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung oleh Badan Usaha Milik Negara dikategorikan sebagai hubungan *business to business* atau *government to business*, dimana pembangunan jalan tol tersebut bertujuan untuk kepentingan umum, mengapa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*. Keterkaitan antara penyediaan dana talangan pengadaan tanah jalan tol dengan pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung oleh Badan Usaha Milik Negara apabila Proyek tersebut termasuk dalam Proyek Strategis Nasional. Masalah yang timbul antara penyedia dana talangan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan tol tersebut, yaitu: besaran biaya dana (cost of fund); dan mekanisme jangka waktu pencairan dana talangan. Penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada PT Utama Karya (Persero) berdasarkan Perpres Nomor 100 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 117 Tahun 2015, selain pemerintah memberikan penugasan pemerintah juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perusahaan jalan tol tersebut. Penugasan tersebut bisa disimpulkan sebagai hubungan transaksional *Government to Business*.